KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Program LPDP: Jangan Stop Anggaran APBN, Justru Ditambah Dong
Tanggal : Minggu, 28 Januari 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Program LPDP

Jangan Stop Anggaran APBN, Justru Ditambah Dong

KETUA Komisi X DPR Syaiful Huda menolak tegas gagasan untuk menghentikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Harusnya dukungan APBN untuk Program LPDP dipertahankan, bahkan perlu diperbesar untuk memperluas kesempatan bagi anak bangsa melanjutkan pendidikan ke kampus berkualitas di seluruh dunia.

"Kami menolak penghentian kucuran dana APBN untuk LPDP. Dalam pandangan kami justru kucuran dana untuk LPDP ditambah agar kuota mahasiswa penerima beasiswa dari program ini semakin banyak," kata Syaiful Huda, kemarin.

Huda menjelaskan, setiap tahun Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp 20 triliun dari dana APBN untuk Dana Abadi Pendidikan. Dana Abadi Pendidikan itulah yang saat ini digunakan untuk membiayai Program LPDP.

"Saat ini Dana Abadi Pendidikan telah terkumpul Rp 140 triliun dengan nilai manfaat per tahun yang bisa digunakan untuk membiayai keperluan beasiswa di kisaran Rp 5 triliun," ungkap politisi Fraksi PKB ini.

Dia menuturkan, dalam satu tahun kuota penerima beasiswa LPDP berada pada kisaran 9.000 hingga 10.000 mahasiswa. Dengan jumlah tersebut, harusnya kuota penerima beasiswa inilah yang semestinya diperbanyak. Sehingga semakin banyak mahasiswa Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di kampus ternama, baik di dalam maupun luar negeri.

"Dan salah satu cara kuota bisa diperbanyak adalah dana abadi pendidikan LPDP diperbesar, bukan malah dihentikan," bebernya.

Dia bilang, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia saat ini masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam. Salah satu penyebabnya, lantaran tingginya biaya pendidikan tinggi.

"Kami meminta pemerintah harus mulai memikirkan langkah terobosan untuk meningkatkan peluang bagi peserta didik Indonesia agar bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Bisa jadi dengan menggunakan manfaat dana abadi pendidikan," ungkapnya.

Hal senada diutarakan anggota Komisi XI DPR Puteri Komaruddin. Menurutnya, dukungan negara untuk pembiayaan kuliah di perguruan tinggi sebaiknya tetap dilanjutkan. Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan lulusan mahasiswa di tingkat Magister dan Doktor yang dapat bersaing dengan negara lain.

"Sehingga dengan dukungan LPDP ini dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing," kata Puteri. ■KAL